BKSAP DPR RI Bekerja Sama dengan Amnesty International Indonesia:
“Menembus Batas Solidaritas: Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Orang Rohingya”

Jakarta, 5 Maret 2025 – Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya masih berlangsung hingga hari ini, dengan adanya konflik berkepanjangan yang terjadi di Myanmar dan kesulitan pengungsi Rohingya dalam mencari perlindungan. Menyadari diperlukannya pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan krisis berkepanjangan tersebut, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) berkolaborasi dengan Amnesty International Indonesia untuk mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang bertajuk “Menembus Batas Solidaritas: Perlindungan Hak Asasi bagi Orang Rohingya”.

Foto bersama sesi diskusi pertama Focus Group Discussion
“Menembus Batas Solidaritas: Perlindungan Hak Asasi bagi Orang Rohingya”

Acara ini diselenggarakan di Ruang Diplomasi Parlemen, Gedung Nusantara III DPR RI, dengan menghadirkan pemantik dan penanggap dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat kementerian negara dan lembaga, seperti Komisi XIII DPR RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden,

Secretariat:
YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.
Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

T. +6221-3929840 **E.** secretariat@suaka.or.id **W.** suaka.or.id

Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Selain itu, acara ini dihadiri pula organisasi internasional, yakni UNHCR, IOM, AICHR, dan AIPA, dan juga organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti SUAKA, KontraS Aceh, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Diskusi tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan pembukaan oleh Dr. Mardani Ali Sera selaku ketua BKSAP DPR RI. Melatarbelakangi acara ini, ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki amanat konstitusi untuk turut serta dalam perdamaian dunia dan perangkat yang dapat mendukung penanganan pengungsi, tetapi langkah yang lebih komprehensif dan terkoordinasi masih perlu dilakukan dalam implementasinya.

Menjadi pemantik dalam sesi diskusi yang pertama, Atika Yuanita Paraswaty selaku Ketua Perkumpulan SUAKA memaparkan kondisi pengungsi di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan pengungsi Rohingya. Secara khusus, ia mengatakan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia berada di tengah ketidakpastian karena tidak adanya kebijakan di level nasional yang komprehensif untuk melindungi pengungsi. Kondisi tersebut dapat terlihat dari berbagai peristiwa lempar tanggung jawab yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menangani pengungsi.

Ketidakpastian kondisi tersebut turut diperparah dengan terjadinya berbagai penolakan di tengah masyarakat akibat dari disinformasi dan ujaran kebencian kepada pengungsi Rohingya di sosial media. Atika turut mencatat situasi terkini terkait pemberhentian dana bantuan oleh pemerintah Amerika Serikat pada awal tahun 2025 Akibatnya, kerentanan pengungsi menjadi semakin meningkat. “Pemberhentian bantuan ini berdampak besar bagi kondisi pengungsi di Indonesia, seperti halnya pengungsi Rohingya yang semakin kesulitan dalam mengakses hak dasar,” ujar Atika.

Melengkapi pemaparan Atika, Professor Tri Nuke Pudjiastuti selaku Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam upaya kemanusiaan dan keterlibatan untuk membangun perdamaian dunia. Namun, implementasi perlindungan pengungsi masih kurang efektif, seperti halnya dalam ketidakselarasan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan pemahaman pemangku kepentingan terkait perlindungan pengungsi.

Dalam mendorong adanya *long term solution*, negara perlu membangun tata kelola dan kolaborasi yang dapat meningkatkan kepastian penanganan pengungsi. Ia menjelaskan, “Sudah ada praktik baik yang dilakukan oleh CSO (*civil society organization)*, UNHCR, dan IOM, hal ini bisa dikembangkan kembali dengan adanya pemerintah dalam posisi regulator dan fasilitator.”

Foto sesi diskusi dan tanya jawab

Dalam sesi kedua, Wirya Adiwena selaku Deputy Director Amnesty International Indonesia memantik diskusi terkait mekanisme internasional dalam penyelesaian krisis Rohingya. Ia menyorot bagaimana situasi krisis Rohingya ini masih bersifat darurat, dengan adanya *ethnic cleansing* yang masih terjadi kepada Rohingya dan kondisi pendanaan yang terbatas di pengungsian.

Di kancah internasional, ia mengatakan bahwa terjadi normalisasi ketidakpastian situasi dan dehumanisasi pengungsi Rohingya. Lantas, komitmen untuk mendobrak kondisi tersebut menjadi penting, terlebih dalam menguatkan prinsip *non-refoulement* dan mengembangkan mekanisme penyelamatan melalui *Bali Process* dan UNCLOS.

Acara yang berlangsung selama kurang lebih empat jam tersebut telah merefleksikan pentingnya peningkatan pemahaman bersama terkait perlindungan pengungsi agar penderitaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya tidak kembali terulang. Hal ini menjadi penting pula dalam memperluas keterlibatan *multi stakeholder,* dengan pemerintah yang mendorong orkestrasi penanganan pengungsi di Indonesia dan penyelesaian krisis Rohingya. Melalui acara ini pula, terdapat harapan bahwa DPR dapat menjadi katalisator untuk mendorong kebijakan dan implementasi perlindungan pengungsi di Indonesia, termasuk bagi para pengungsi Rohingya.

Secretariat:
YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.
Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

T. +6221-3929840 **E.** secretariat@suaka.or.id **W.** suaka.or.id

BKSAP DPR RI in Collaboration with Amnesty International Indonesia: "Breaking the Boundaries of Solidarity: Protecting the Human Rights of Rohingya People"

Jakarta, March 5, 2025 – The humanitarian crisis affecting the Rohingya ethnic group continues to this day, with prolonged conflicts in Myanmar and the difficulties Rohingya refugees face in seeking protection. Recognizing the need for a collaborative approach to addressing this ongoing crisis, the Inter-Parliamentary Cooperation Agency of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (BKSAP DPR RI) collaborated with Amnesty International Indonesia to hold a Focus Group Discussion (FGD) titled *"Breaking the Boundaries of Solidarity: Protecting the Human Rights of Rohingya People."*

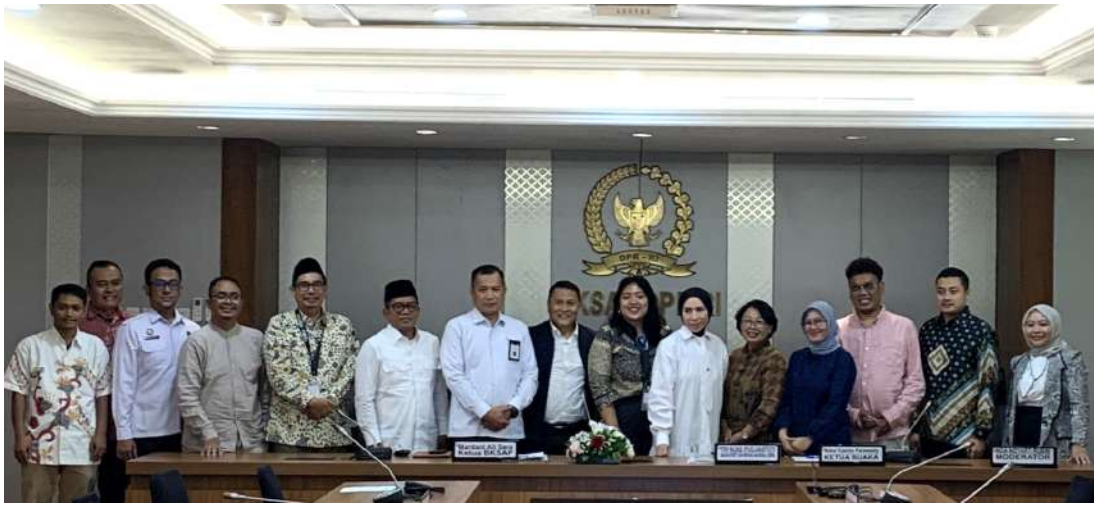

Group photo from the first discussion session of the Focus Group Discussion (FGD)
"Breaking the Boundaries of Solidarity: Protecting the Human Rights of Rohingya People"

The event took place in the Parliamentary Diplomacy Room, Nusantara III Building, DPR RI, featuring speakers and panelists from various stakeholders at the ministerial and institutional levels, such as Commission XIII of the DPR RI, the Directorate General of Immigration and

Secretariat:
YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.
Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

T. +6221-3929840 **E.** secretariat@suaka.or.id **W.** suaka.or.id

Correctional Affairs, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Home Affairs, the Presidential Staff Office, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan). Additionally, international organizations such as UNHCR, IOM, AICHR, and AIPA, as well as civil society organizations (CSOs) including SUAKA, KontraS Aceh, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah, participated in the event.

The discussion began at 2:00 PM WIB with an opening speech by Dr. Mardani Ali Sera, Chairman of BKSAP DPR RI. In his remarks, he emphasized that Indonesia has a constitutional mandate to contribute to global peace and mechanisms to support refugee management. However, a more comprehensive and coordinated approach still needs to be improved for effective implementation.

The first discussion session was started by Atika Yuanita Paraswaty, Chairperson of SUAKA, who elaborated on the situation of refugees in Indonesia and the challenges faced in protecting Rohingya refugees. She highlighted that refugee management in Indonesia remains uncertain due to the absence of a comprehensive national policy for refugee protection. This uncertainty is evident in the frequent instances of responsibility-shifting among stakeholders in handling refugees.

This precarious situation is further exacerbated by increasing public rejection fueled by misinformation and hate speech against Rohingya refugees on social media. Atika also noted the recent termination of financial aid from the United States government at the beginning of 2025, which has further heightened refugee vulnerabilities. *"This funding cut has significantly impacted the condition of refugees in Indonesia, particularly Rohingya refugees, who now face even greater difficulties in accessing basic rights,"* Atika stated.

Complementing Atika's presentation, Professor Tri Nuke Pudjiastuti, a researcher at the National Research and Innovation Agency (BRIN), emphasized that Indonesia has a strong foundation in humanitarian efforts and peacebuilding. However, refugee protection implementation remains

ineffective, partly due to inconsistencies in enforcing Presidential Regulation No. 125 of 2016 and the lack of understanding among stakeholders regarding refugee protection.

To promote a long-term solution, the state must establish governance and collaboration frameworks that ensure more certainty in the refugee management. She explained, *"There are already good practices being carried out by CSOs, UNHCR, and IOM. These initiatives can be further developed, with the government taking on the role of regulator and facilitator."*

Photo of the discussion and Q&A session

During the second session, Wirya Adiwena, Deputy Director of Amnesty International Indonesia, led a discussion on international mechanisms for resolving the Rohingya crisis. He highlighted that the crisis remains urgent, with ethnic cleansing still occurring against Rohingya people and limited funding available for refugee protection.

On the international stage, he pointed out the normalization of the protection uncertainty and the dehumanization of Rohingya refugees. Therefore, it is crucial to address the problems,

Secretariat:
YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.
Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

T. +6221-3929840 **E.** secretariat@suaka.or.id **W.** suaka.or.id

particularly by reinforcing the principle of *non-refoulement* and enhancing rescue mechanisms through the Bali Process and UNCLOS.

The four-hour event underscored the importance of strengthening collective understanding of refugee protection to prevent the recurrence of suffering among Rohingya refugees. It also highlighted the need to expand multi-stakeholder involvement, with the government taking a leading role in orchestrating refugee management in Indonesia and resolving the Rohingya crisis. Through this event, there is hope that the DPR can act as a catalyst in advancing policies and refugee protection measures in Indonesia, including for Rohingya refugees.

Secretariat:
YLBHI - YLBHI Building, 1st fl.
Jl. Diponegoro No. 74 Gondangdia, Pegangsaan Dua, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

T. +6221-3929840 **E.** secretariat@suaka.or.id **W.** suaka.or.id